

# POLICY BRIEF

## Penguatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Malang Jawa Timur

*Sujarwoto dan Asri Maharani*

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya



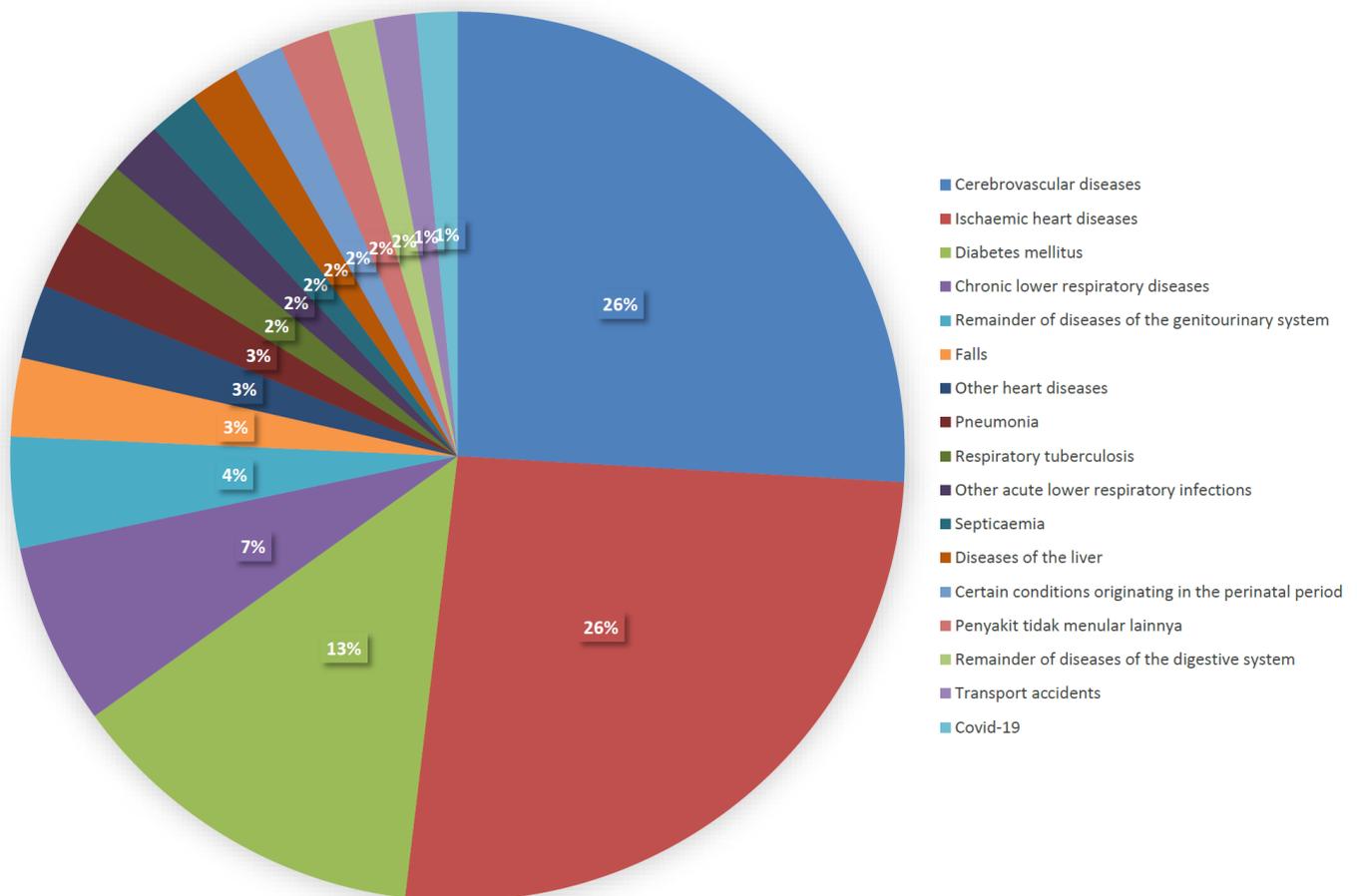
Foto: pemeriksaan lansia oleh kader Kesehatan Posbindu PTM di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang saat ini sedang dihadapkan pada empat tantangan pembangunan kesehatan. Pertama, transisi epidemiologi dimana penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan dan pada saat yang sama jumlah penyakit tidak menular terus meningkat. Kedua, transisi kependudukan atau demografi dimana jumlah penduduk usia muda masih cukup besar dan pada saat yang sama jumlah penduduk usia produktif dan lansis terus meningkat. Ketiga, transisi gizi dimana masalah kekurangan gizi masih ditemukan khususnya pada sebagian besar keluarga miskin dan pada saat yang sama jumlah penduduk yang mengalami obesitas semakin bertambah. Keempat, transisi perilaku dimana semakin kuatnya pengaruh modernisasi dan teknologi informasi telah menyebabkan generasi mager (malas gerak) yang lebih suka mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi kadar gula, garam, lemak. Selain itu urbanisasi telah menyebabkan tekanan kerja,

stress dan pada saat yang sama budaya merokok masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

## Kondisi PTM yang mengkhawatirkan di Kabupaten Malang

Penyakit penyebab kematian di Kabupaten Malang tahun 2020



Berdasarkan laporan data ePuskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2020, tiga penyakit penyebab utama kematian adalah penyakit jantung dan diabetes. Data ini diperkuat dengan survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Tim SMARThealth dengan total populasi 28.508 individu yang menemukan 23% usia 40 tahun keatas 6.841 individu beresiko tinggi penyakit jantung. Selain diakibatkan oleh transisi epidemiologi dan transisi gizi, penyebab lainnya adalah masih rendahnya upaya pelayanan pencegahan terhadap penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung dan diabetes. Kebijakan nasional terkait standar pelayanan minimal di bidang kesehatan mengamanatkan setiap pemerintah daerah

untuk melakukan skrining tekanan darah dan gula darah pada seluruh penduduk usia 15 tahun dan lebih tua minimal 1 tahun sekali. Laporan Dinas Kesehatan tahun 2022 menunjukkan capaian skrining tekanan darah dan gula darah di Kabupaten Malang baru mencapai sekitar 50% penduduk usia 15 tahun keatas. Masih ada sekitar 5 dari 10 warga Kabupaten Malang yang belum terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh pemeriksaan tekanan darah dan gula darah.

Rendahnya capaian skrining tersebut disebabkan oleh (1) terbatasnya tenaga kesehatan di tingkat desa/kelurahan, (2) terbatasnya peralatan kesehatan, dan (3) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk

memeriksa tekanan darah dan gula darah secara rutin.

## Profil dan isu CBHI di Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang telah mencanangkan program Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) Penyakit Tidak Menular (PTM) sejak tahun 2006 sebagai bentuk CBHI dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat melalui kegiatan skrining tekanan darah, gula darah, diet, rokok dan kesehatan mental serta promosi kesehatan. Oleh karena itu revitalisasi CBHI dalam meningkatkan cakupan layanan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di Provinsi ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

CBHI memiliki berbagai keunggulan sebagai ujung tombak layanan dasar kesehatan untuk pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular pada konteks negara berkembang yang umumnya memiliki sumber daya terbatas: (1) CBHI melandaskan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sehat. Keterlibatan masyarakat telah terbukti menjadi kunci sukses pembangunan kesehatan

di Indonesia seperti dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) pada masa Orde Baru; (2) CBHI berakar dari kekayaan modal sosial yang ada di Indonesia. Gotong royong merupakan ciri budaya Indonesia yang selama ini besar kontribusinya bagi keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan; (3) *unmet need for services* merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam memperluas cakupan layanan pengendalian risiko penyakit tidak menular. Revitalisasi CBHI merupakan upaya strategis untuk memecahkan masalah tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan layanan dasar dan pengendalian risiko penyakit tidak menular.

Sampai dengan tahun 2022, jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Malang masih 1,011 atau 4 Posbindu per 10.000 penduduk. Jumlah ini tentu masih belum cukup ideal untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada warga.

## Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Malang

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Malang perlu melakukan beberapa upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan penyakit tidak menular melalui penguatan CBHI dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah Kabupaten Malang perlu mengeluarkan peraturan daerah untuk mendorong masyarakat khususnya di tingkat rukun warga dan kelompok masyarakat lainnya untuk membentuk Posbindu PTM. Posbindu PTM perlu dibentuk pada berbagai kelompok yang ada di masyarakat setempat dimana masyarakat setempat melakukan kegiatan bersama meliputi kegiatan keagamaan, pemuda dan karangtaruna, dasawisma, dan sejenisnya.
- Pemerintah daerah Kabupaten Malang perlu memfasilitasi pemerintah desa dan kelurahan serta kelompok masyarakat yang ada di level rukun warga dan pedusunan untuk membentuk Posbindu PTM. Bentuk fasilitasi tersebut diantaranya adalah dengan memberikan bantuan alat

dan sarana prasarana kesehatan berupa tensimeter dan glucometer yang dapat digunakan oleh warga secara bersama-sama melakukan pengecekan kesehatan.

- Pemerintah Kabupaten Malang perlu bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan serta warga setempat untuk merekrut kader kesehatan sebanyak mungkin di setiap rukun warga dan pedusunan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu memberikan pelatihan secara rutin kepada kader Posbindu PTM sehingga memiliki ketrampilan untuk membantu warga melakukan pengecekan kesehatan secara rutin.
- Pemerintah Kabupaten Malang perlu bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan sehingga pemerintah desa/kelurahan mampu mengalokasikan anggaran desa untuk mendukung pelayanan Posbindu PTM sampai dengan level rukun warga dan pedesaan.

#### *Ucapan terimakasih*

Policy brief ini dapat diterbitkan atas dukungan dana penelitian DRPM Kompetisi Riset Kementerian Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Indonesia Dasar Tahun 2022 dengan Nomor SPK 087/E5/PG/02.00.PT/2022 dan nomor SPK turunan 071.50/UN10.C10/TU/2022